



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HOTRUN SIREGAR**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **1000154**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.795.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/234 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah Seluas 21 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 16.388 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. Tanah Seluas 26.976 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 21.626 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 57.000 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 23.000 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
8. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 22.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 99.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 44.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.960.700.000

III. HUTANG Rp. 95.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.865.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGEDALIAN DAN EVALUASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUKHAMMAD FAHRUROZI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **761630**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.845.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 51 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 2.700 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/123 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.960.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 106.800.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000



4. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON 2024 Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	78.258.441
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.030.058.441

III. HUTANG Rp. 1.904.126.784

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.125.931.657

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 April 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ELFRIDA HERAWATI SIREGAR**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **778370**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 138.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 70.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 2.758.000.000**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 2.758.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SADONO SRIHARJO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 717386

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.095.000.000

1. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 685.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000
3. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 825.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 55.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.152.500.000

III. HUTANG Rp. 715.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.437.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAKOB K.M.
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 760849

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 762 m2/762 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, WARISAN Rp. 6.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G A/T Tahun 2012, WARISAN , HADIAH , Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 350.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.620.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.620.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FUAD LUTFI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 760439

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.091.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/97 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 967 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 241.750.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERRIOS ALL NEW R AT DELUXE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA NEW VARIO 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 132.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.500.276

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.411.250.276

III. HUTANG Rp. 541.745.760

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 869.504.516



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SABRI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 760699

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 455.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/12 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/107 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO M3 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO A/T SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 11.000.000

Sub Total Rp. 679.000.000

III. HUTANG Rp. 625.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 54.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI

I. DATA PRIBADI

- Nama : IRENE CAMELYN SINAGA
- Jabatan : DIREKTUR
- NHK : 488410

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/99 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	95.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.095.000.000

III. HUTANG Rp. 338.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.757.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FUAD HIMAWAN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 840465

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/114 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/180 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/370 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	516.641
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.915.516.641
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.915.516.641

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABBAS
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 135112

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.770.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.770.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	105.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	284.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	180.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.339.000.000

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.339.000.000**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI
DAN JARINGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS MOH NAJIB
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 909073

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/75 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 51.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ 300 E AT Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX 2019 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.651.000.000

III. HUTANG Rp. 70.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.581.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI
DAN JARINGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TOTO PURBIYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 760136

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/21 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/21 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 180.500.000

1. MOBIL, HONDA HRV E Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 21.250.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 307.326.841

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.009.076.841

III. HUTANG

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

3.009.076.841

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI SUBOWO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 146063

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.865.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/64 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.530.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000
3. Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 1.720 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 355.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **352.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **51.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **1.550.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **120.709.353**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **4.939.209.353**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **4.939.209.353**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITRI SUHARIYADI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 149248

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.383.405.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
2. Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 823.405.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MOBIL RODA 4 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 408.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 231.565.687

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.138.470.687

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.138.470.687



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KAHFI HERIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **629730**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/144 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/320 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 403.812.148

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.917.312.148

III. HUTANG Rp. 62.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.854.912.148

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI PURNO UTOMO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 760900

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 43 m2/43 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000.000
5. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 889 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 1.000.000.000
7. Tanah Seluas 1.726 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **620.000.000**

1. MOBIL, MAZDA MAZDA 2 1.5L A/T GT SKYACTIV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TAFT F50 RV Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000



3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G, AT DSL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI KAZE R Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	6.144.705.531
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.279.036.228
F. HARTA LAINNYA	Rp.	15.000.000
Sub Total	Rp.	16.232.741.759

III. HUTANG	Rp.	----
-------------	-----	------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.232.741.759
-----------------------------------	-----	----------------

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHNAN MARBAWI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 954089

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 780.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/73 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 33 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 469.629

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 780.469.629

III. HUTANG Rp. 35.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 745.469.629

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.